

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah transmigrasi di Indonesia yang sudah mencapai satu abad lebih, sejak mulai dilaksanakan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga saat ini telah melalui berbagai masa pemerintahan dan kekuasaan yang berbeda. Walaupun secara demografis pengertian umum dari transmigrasi ini tetap sama dari masa ke masa, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang kurang atau jarang penduduknya, tetapi dalam pelaksanaannya didasarkan pada latar belakang, tujuan, dan kebijakan yang berbeda-beda, baik yang tertulis secara resmi maupun terselubung.

Suwartapradja (2002) mengemukakan bahwa transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif Pemerintah yang khas Indonesia, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama. Tidak ada satu pun negara lain yang menerapkan program transmigrasi. Pengertian yang lebih spesifik, transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang berpenduduk padat ke wilayah lain yang berpenduduk jarang di luar pulau Jawa. Namun, demikian pengertian transmigrasi telah berkembang menjadi beberapa varian, saat ini misalnya, ada istilah transmigrasi lokal yaitu pemindahan penduduk di dalam satu pulau baik di pulau Jawa sendiri maupun di luar pulau Jawa.

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan,

arah dan ruang lingkup dari pembanunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian pada dasarnya bertujuan (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, (2) meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, (3) menjadi sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Transmigrasi merupakan sektor pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui perpindahan atau penempatan penduduk di daerah-daerah bukaan baru untuk berusaha di bidang pertanian, perkebunan, atau bidang-bidang lain sesuai peluang dan potensi ekonomiyang tersedia. Oleh karena itu, sejak tahun 2004 pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan progam transmigrasi lokal yang dilakukan masih dalam satu wilayah Kabupaten, dengan perpindahan dari satu Kecamatan ke Kecamatan yang lain, yaitu warga Kecamatan Samigaluh ke Kecamatan Galur.

Latar belakang diadakannya Transmigrasi Lokal adalah daerah Kecamatan Samigaluh yang rawan bencana alam longsor. Permasalahan lainnya yang dialami oleh Pemerintah adalah terbatasnya lahan untuk dikembangkan menjadi lahan pemukiman. Upaya terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai sebagai lahan pertanian. Di satu sisi lain upaya transmigrasi lokal ini adalah memberikan tempat tinggal yang aman, tentunya tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah dalam program penataan kawasan transmigrasi di Karangsewu Kabupaten Kulon Progo yang dimulai sejak tahun 2004 dengan tujuan : 1) Eksploitasi, pengolahan dan perdagangan hasil laut, 2) Peningkatan budidaya pertanian, 3) Penataan wilayah secara terpadu, 4) Akselerasi pembangunan daerah baru, penumbuhan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dan 5) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu persoalan pembangunan ekonomi masyarakat transmigrasi adalah masalah kesulitan mengakses permodalan. Meskipun permodalan bukan satu-satunya persoalan terpenting, namun permodalan merupakan unsur penting dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, taraf hidup masyarakat transmigrasi. Untuk membantu masyarakat transmigrasi dalam mengakses permodalan, maka perlu dibangun suatu fasilitas kelembagaan yang sesuai dengan kearifan lokal yang memiliki peran sebagai pengganti lembaga keuangan (bank), karena bank yang ada selama ini operasionalnya tidak sampai di kawasan transmigrasi. Kelembagaan yang sesuai dengan kawasan tersebut antara lain adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat transmigrasi di pemukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus (*sustainable*). Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut yang telah dan dikembangkan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, adalah menumbuhkan LKM BMT-Trans.

Menurut Wijono (2005), LKM sudah banyak terbentuk dan tersebar mulai dari perkotaan dan perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai in formal dengan karakterisiknya masing-masing. Meskipun karakterisiknya beragam, namun fungsinya sama sebagai penyedia jasa keuangan dalam modal kegiatan usaha perekonomian masyarakat.

LKM BMT-Trans merupakan lembaga keuangan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat transmigrasi. Sejak tahun 2008 di Lokasi Transmigrasi Karangsewu atas inisiatif masyarakat telah berdiri LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pembiayaan dan pendanaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah.

Sebagai lembaga keuangan mikro, LKM BMT Trans Ngudi Makmur mampu menghasilkan nilai sosial dan nilai ekonomi. Dengan pandangan tersebut, selayaknya operasional BMT bergerak dalam motif sosial dan motif keuntungan. Motif sosial bermakna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Motif keuntungan bermakna pengembangan dan peningkatan daya saing BMT. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi ataupun berupa insentif sosial lainnya

Permasalahannya adalah walaupun sudah banyak muncul dan berkembang LKM di lingkungan masyarakat namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan LKM masih ada, yaitu pada sektor pertanian pemenuhan

permodalan masih selalu menjadi persoalan. Satu sisi lain selain masalah permodalan yang cukup sulit untuk sektor pertanian yaitu banyak LKM yang hanya berperan dalam permodalan saja. Inilah yang menjadi perbedaan antara LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR dengan LKM yang lainnya dikarenakan LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR memberikan portofolio pembiayaan 70% ke pertanian dan 30% untuk perdagangan dalam industri kecil dan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga dilakukan dalam upaya untuk membina kegiatan usahatani pada petani.

LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR memberikan permodalan bagi masyarakat Transmigrasi Ring-1 Karangsewu yang memang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Permodalan memang menjadi suatu komponen yang penting dalam jalannya kegiatan usaha termasuk usahatani. Peran LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR tidak hanya sebatas sebagai memberikan fasilitas jasa keuangan saja tetapi melakukan pemberdayaan pada semua kegiatan usaha yang ada disana dengan tujuan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil survey lapangan, di peroleh informasi bahwa dari tahun 2008 sejak LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR berdiri telah adanya strategi pendampingan dan peningkatan SDM. Pada tahun 2011 dilakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu budidaya pepaya California organik dan pengembangan Ayam Lokal Pedaging Unggulan (ALPU). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi strategi pemberdayaan masyarakat dan bagaimana pencapaian keberdayaan

masyarakat dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR untuk masyarakat transmigrasi lokal.

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan profil LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR
2. Mendeskripsikan implementasi strategi LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR dalam pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal
3. Mendeskripsikan pencapaian keberdayaan masyarakat transmigrasi lokal dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal dalam kemandirian ekonomi melalui Lembaga Keuangan Mikro.
2. Bagi LKM BMT TRANS NGUDI MAKMUR, dapat memberikan evaluasi dan saran terkait penyusunan langkah strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal.
3. Bagi Pemerintah, dapat menjadi sebagai referensi tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kelembagaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi.